

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN INTERNAL DOSEN**  
**Program Studi Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Strategi Optimalisasi E-Government Untuk Mewujudkan Good Governance  
di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Bojonegoro**

**Tim Peneliti:**

1. Heny Suhindarno. S.Sos.,M.Si.
2. DR.Mochtar Setijohadi,.S.Pt,MM.
3. Lita Tri Cahyaningrum

*Dibiayai oleh:*

*Universitas Bojonegoro*

*Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026*

Nomor Kontrak:

022 / LPPM-LIT / UB /2025

**UNIVERSITAS BOJONEGORO**

**2025**



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian internal dosen yang berjudul **“Strategi Optimalisasi E-Government Untuk Mewujudkan Good Governance di Desa Plesungan, Bojonegoro”**. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan besar untuk membantu dalam penyusunan proposal penelitian internal ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan rujukan dan masukan bagi pembaca. Terima kasih kepada LPPM Universitas Bojonegoro yang telah memberikan fasilitas dan pendampingan sehingga penulis dapat menyelesaikan dan mengajukan proposal penelitian ini sesuai alur yang telah ditetapkan.

Bojonegoro, 27 Februari 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Ringkasan</b> .....	6
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	7
1.1 Latar Belakang .....	7
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pengertian E-Government.....	11
2.1.2 Teori Good Governance.....	12
2.1.3 Teori Partisipasi Masyarakat .....	12
2.2 Penelitian Terdahulu .....	13
2.3 Kerangka Konsep Penelitian .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	16
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	20
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	21
4.1 Hasil Penelitian .....	21
4.2 Pembahasan .....	22
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	28
5.1 Kesimpulan .....	28
5.2 Saran .....	29
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	31

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>13</b>
--	-----------

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian .....	18
------------------------------------	----

### **Ringkasan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Meskipun pemerintah daerah telah menerapkan *e-government* melalui Sistem Informasi Desa (SID) sebagai upaya mewujudkan *good governance*, pelaksanaannya di Desa Plesungan masih menghadapi kendala. Permasalahan empiris yang muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta rendahnya literasi dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Kondisi tersebut menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan strategi optimalisasi *e-government* yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-government* melalui Sistem Informasi Desa (SID) telah meningkatkan efektivitas pelayanan publik, namun masih terkendala keterbatasan SDM, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi optimalisasi yang diperlukan meliputi peningkatan kompetensi aparatur, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi dan keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis teknologi.

**Kata kunci:** E-Government, Good Governance, Strategi Optimalisasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Transformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan *electronic government* (e-government), yaitu penggunaan teknologi digital dalam aktivitas pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi.

Di Indonesia, komitmen pemerintah terhadap pengembangan e-government telah ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini menempatkan e-government sebagai instrumen penting untuk mewujudkan *good governance*, yang berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat (Firdausijah & Priatna, 2020).

Secara empiris, penerapan e-government di Indonesia masih menghadapi tantangan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro, yang dikenal sebagai daerah pelopor keterbukaan informasi publik. Sejak tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menginisiasi program *Open Government Partnership* (OGP) sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik. Namun, penelitian Suprastiyo (2019) menemukan bahwa implementasi OGP di Bojonegoro belum berjalan optimal; dari 419 desa yang ada, hanya 50 desa yang menerapkan prinsip keterbukaan informasi, sementara sisanya masih dalam kategori “menuju terbuka.” Hambatan utama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya komunikasi birokrasi, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi di tingkat desa.

Penelitian Pria et al (2024) di Kecamatan Gondang menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam pelayanan publik memang mulai diimplementasikan, namun belum sepenuhnya berjalan efektif. Aparatur pemerintah menghadapi kendala berupa keterbatasan kemampuan digital, infrastruktur yang belum memadai, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap layanan berbasis daring. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Musthofa et al (2024) di Kecamatan Malo, di mana pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai wujud implementasi e-government masih belum optimal. Hambatan seperti minimnya pelatihan operator, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan jaringan internet menghambat terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

Selain tantangan di tingkat aparatur dan infrastruktur, aspek sosial masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan e-government. Penelitian (Marfu'ah et al., 2024) mengenai digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Bojonegoro belum siap untuk beradaptasi dengan sistem digital. Faktor ketidaksiapan ini disebabkan oleh rendahnya literasi digital, minimnya sosialisasi dari pemerintah, dan keterbatasan perangkat teknologi seperti smartphone. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem dan kebijakan, tetapi juga pada kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Temuan empiris tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal e-government dengan kondisi penerapannya di lapangan. Secara konsep, e-government seharusnya mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan e-government di Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi berbagai kendala teknis, struktural, dan sosial. Kurangnya integrasi antarprogram digital, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, serta minimnya keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi penerapan e-government dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah tersebut.

Dari perspektif akademik, kajian-kajian sebelumnya umumnya masih bersifat deskriptif dan terbatas pada bidang tertentu. Beberapa penelitian hanya menyoroti aspek keterbukaan informasi, pelayanan publik di tingkat kecamatan, penerapan sistem informasi desa, maupun kesiapan masyarakat terhadap digitalisasi layanan. Belum terdapat penelitian yang secara menyeluruh dan terpadu membahas strategi optimalisasi e-government di Bojonegoro dengan pendekatan lintas sektor yang mampu memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kabupaten.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya merumuskan strategi optimalisasi e-government yang efektif dan dapat diterapkan secara nyata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Strategi yang dihasilkan diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta menjadi pedoman praktis bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan digital yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: "Bagaimana strategi optimalisasi e-government yang efektif dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)?"

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui strategi optimalisasi e-government yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

##### 1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu Administrasi Publik melalui pengembangan kajian tentang penerapan *e-government* sebagai sarana mewujudkan *good governance* di tingkat daerah dan desa. Selain itu, penelitian ini memberikan model konseptual optimalisasi *e-government* yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya serta referensi bagi akademisi dalam mengkaji hubungan antara teknologi digital, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

hasil penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman dan memperkaya wawasan dalam bidang Administrasi Publik, khususnya mengenai strategi optimalisasi *e-government* dalam mewujudkan *good governance* di tingkat daerah dan desa.

###### b. Bagi Pemerintah

penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penerapan *e-government*, serta pedoman dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

###### c. Bagi Univeritas Bojonegoro

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi akademik serta menjadi tambahan literatur dalam pengembangan ilmu administrasi publik yang relevan dengan perkembangan teknologi pemerintahan digital.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian E-Government**

Teori *e-government* menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. (Najich Alfayn, 2022) Menyatakan bahwa transformasi digital melalui *e-government* merupakan strategi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penerapan *e-government* tidak hanya memfokuskan diri pada penyediaan layanan publik berbasis digital, tetapi juga pada reformasi birokrasi agar lebih adaptif dan efisien. Hasil penelitian (Dwibin Kannapadang et al., 2025) Menunjukkan bahwa penerapan *e-government* secara optimal berdampak langsung terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

Selain itu, penelitian (Febria Nurita, 2016) Menegaskan bahwa keberhasilan *e-government* ditentukan oleh dukungan kebijakan, kompetensi aparatur, serta kesiapan infrastruktur teknologi. Di Pemerintah Kota Malang, *e-government* terbukti mampu meningkatkan kecepatan pelayanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Faktor lain seperti literasi digital masyarakat juga memengaruhi keberhasilan implementasi *e-government*. Hasil studi pada (Nurkartika, 2025) Menyebutkan bahwa pemerintah perlu melakukan edukasi publik agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan layanan digital secara optimal. Teori *e-government* memberikan dasar konseptual bahwa transformasi digital bukan hanya persoalan teknologi, melainkan perubahan paradigma birokrasi menuju pemerintahan yang efisien, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik.

### **2.1.2 Teori Good Governance**

(Yaya & Sukardi, 2025) Bahwa pelaksanaan e-government yang selaras dengan prinsip *good governance* berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah desa. Masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengakses informasi, sementara aparatur desa dituntut bekerja secara transparan dan efisien. dalam (Paselle et al., 2025) Juga menegaskan bahwa keberhasilan *good governance* tidak lepas dari kemampuan pemerintah dalam membangun sistem digital yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, terutama pada sektor pelayanan publik.

Teori *good governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan (Najich Alfayn, 2022). Menurut (Wijaya, 2021) *Good governance* berfungsi sebagai fondasi moral dan administratif agar pemerintah dapat menjalankan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. (Dwibin Kannapadang et al., 2025) Juga menunjukkan bahwa e-government menjadi sarana untuk memperkuat prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan sistem digital, masyarakat dapat mengakses informasi pemerintahan secara terbuka dan memantau kinerja aparatur. Teori *good governance* menegaskan bahwa keberhasilan *e-government* hanya dapat tercapai apabila diiringi oleh penerapan nilai-nilai pemerintahan yang baik: transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi publik.

### **2.1.3 Teori Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan efektif. Dalam konteks digitalisasi pemerintahan, teori ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan publik — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Febria Nurita, 2016) Menurut (Yaya & Sukardi, 2025) Partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dari jumlah pengguna layanan digital, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat memengaruhi dan mengawasi jalannya pemerintahan desa secara aktif melalui platform digital.

(Najich Alfayn, 2022) menambahkan bahwa Digitalisasi membuka ruang baru bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan kritik secara terbuka. Studi dari (Nurkartika, 2025) juga menyoroti bahwa keterlibatan masyarakat di daerah masih rendah karena keterbatasan literasi digital dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan edukasi berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas warga dalam menggunakan sistem informasi publik.

Dengan demikian, teori partisipasi masyarakat memperkuat bahwa *e-government* bukan hanya alat teknokratis, tetapi juga wadah demokratis yang mendorong keterlibatan publik secara aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Memuat penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan permasalahan penelitian (sekurang-kurangnya 3 penelitian) di sajikan dalam bentuk tabel dan diurutkan berdasarkan tahun termuda ke tahun tertua.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1	Mukhammad Akhmad Najich Alfayn (2022)	Kualitatif Deskriptif	Variabel: E-Government, Good Governance, Digitalisasi Pelayanan Publik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>e-government</i> mendorong transparansi dan akuntabilitas, namun masih terkendala literasi digital dan infrastruktur di daerah. Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan <i>e-government</i> harus diiringi dengan reformasi birokrasi dan partisipasi publik yang aktif untuk

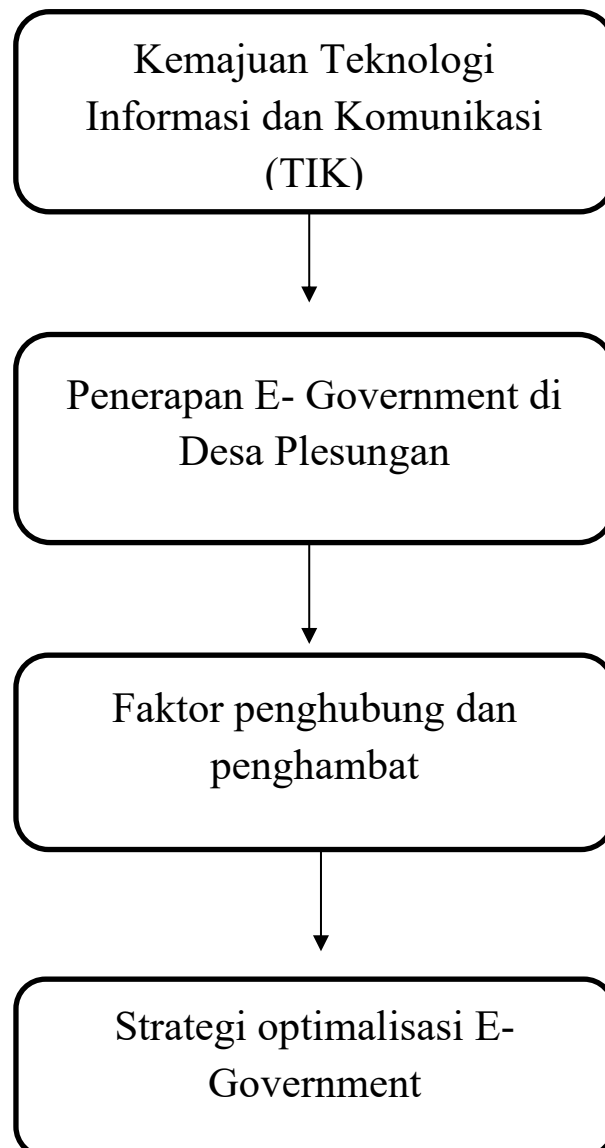
				mewujudkan <i>good governance</i> .
2	R. Taqwaty Firdausijah & Ami Priatna (2020)	Kualitatif	Variabel: Good Governance, Pelayanan Publik, Transparansi	Penelitian ini menekankan bahwa Pelayanan publik yang baik berkontribusi terhadap terciptanya <i>good governance</i> melalui akuntabilitas dan transparansi birokrasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur dan inovasi pelayanan merupakan syarat mutlak untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.
3	Novia Ariyanti & Lutvi Azizah (2023)	Kualitatif	Variabel: Sistem Informasi Desa, Efektivitas Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan SID meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun sosialisasi dan pelatihan operator masih minim. Peneliti menegaskan perlunya kebijakan pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat lebih adaptif terhadap sistem digital.
4	Junior Hendri Wijaya (2021)	Kualitatif (Studi Pustaka)	Variabel: Governance, E-Government, Akuntabilitas Pemerintahan	Penelitian ini menjelaskan bahwa Penerapan e-government belum sepenuhnya menerapkan prinsip

				governance; masih terdapat kesenjangan pelayanan publik antarwilayah. Ditemukan pula bahwa keberhasilan <i>e-government</i> membutuhkan dukungan komitmen kepemimpinan, integrasi sistem, dan partisipasi masyarakat agar tidak hanya menjadi proyek digital, tetapi juga instrumen peningkatan akuntabilitas publik.
5	Yaya & Rahayu (2020)	Kualitatif	Variabel: Siskeudes, Transparansi, Akuntabilitas Keuangan Desa	Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Sistem digital meningkatkan transparansi keuangan desa, tetapi kurang optimal akibat rendahnya kompetensi aparat desa. Peneliti menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa agar digitalisasi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2023)

### 2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan alur berpikir peneliti mengenai hubungan antara konsep *e-government* dengan prinsip *good governance* yang menjadi dasar dalam merumuskan strategi optimalisasi penerapan *e-government* di Desa Plesungan, Kabupaten Bojonegoro.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam strategi optimalisasi *e-government* dalam konteks penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali fenomena secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan informan dan memahami makna di balik fakta empiris yang terjadi di lapangan.

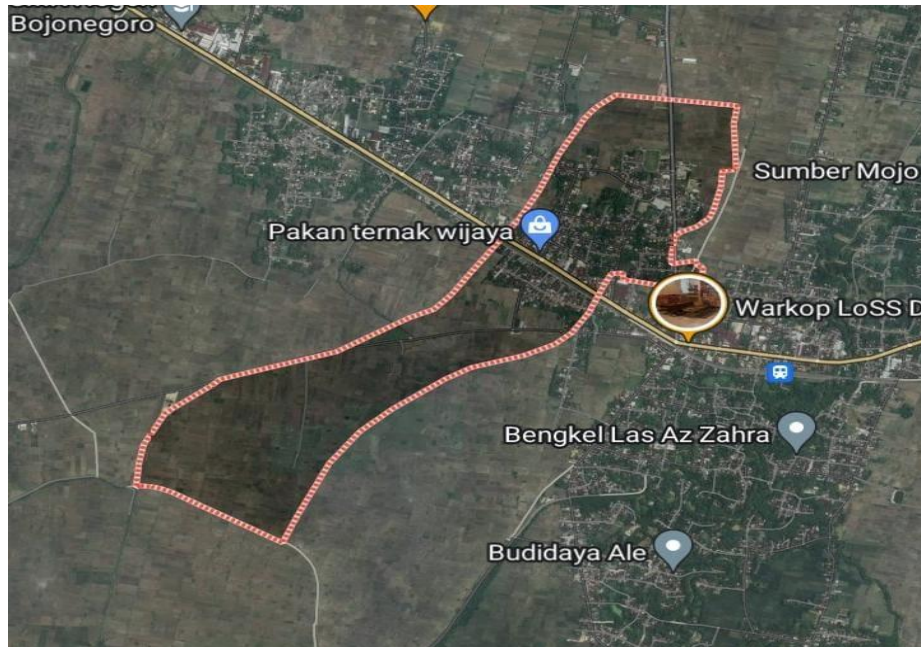
Jenis penelitian deskriptif digunakan karena penelitian ini berfokus pada penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi aktual penerapan *e-government* serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat merumuskan strategi optimalisasi yang relevan dan aplikatif untuk memperkuat prinsip *good governance* di daerah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis berdasarkan hasil analisis terhadap temuan lapangan, kebijakan yang ada, serta pandangan para pemangku kepentingan terkait.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Desa Plesungan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu desa yang telah mulai mengimplementasikan program Sistem Informasi Desa (SID) sebagai bentuk penerapan *e-government* di tingkat lokal, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala baik dari segi teknis maupun nonteknis.

### 3.3 Lokasi Penelitian



*Gambar 3.1 Lokasi Penelitian*

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Desa ini dipilih karena telah menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai bentuk implementasi *e-government*, namun pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan literasi digital masyarakat. Lokasi ini dianggap representatif untuk menggambarkan kondisi penerapan *e-government* di tingkat desa dalam upaya mewujudkan *good governance* di Kabupaten Bojonegoro.

### 3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan *e-government* di Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, baik dari unsur pemerintah desa maupun masyarakat.

Sampel penelitian ditentukan dengan **teknik purposive sampling**, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan adalah mereka yang memahami, terlibat langsung, serta memiliki pengalaman dalam pelaksanaan *e-government* di Desa Plesungan.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak **lima (5) orang**, terdiri dari:

1. Kepala Desa Plesungan
2. Sekretaris Desa
3. Operator Sistem Informasi Desa (SID)
4. Perangkat Desa bagian pelayanan masyarakat
5. Perwakilan masyarakat pengguna layanan publik

### **3.5 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dengan aparatur desa dan masyarakat yang terlibat dalam penerapan *e-government* di Desa Plesungan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen desa, laporan pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID), peraturan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. **Wawancara mendalam**, untuk memperoleh informasi langsung dari informan terkait kondisi, hambatan, dan strategi penerapan *e-government*.
2. **Observasi**, untuk melihat secara langsung aktivitas pelayanan publik berbasis digital di Desa Plesungan.
3. **Dokumentasi**, untuk mengumpulkan data pendukung berupa arsip, foto kegiatan, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan *e-government*.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai penerapan *e-government* di Desa Plesungan.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu menyederhanakan dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan hasil temuan untuk menjawab rumusan masalah dan merumuskan strategi optimalisasi *e-government* di Desa Plesungan.

Melalui tahapan ini, data yang diperoleh dapat diolah secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi e-government dalam mewujudkan good governance di Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Operator Sistem Informasi Desa (SID), perangkat desa bagian pelayanan, dan perwakilan masyarakat pengguna layanan.

Berdasarkan hasil wawancara, Desa Plesungan telah menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai bentuk implementasi e-government dalam pelayanan administrasi publik. Sistem ini digunakan untuk pengelolaan data kependudukan, pembuatan surat-menyurat, serta penyampaian informasi kegiatan desa. Penerapan sistem digital tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi (Najich Alfayn, 2022). Kepala Desa menyampaikan bahwa penerapan SID mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta menjadi sarana untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Transformasi digital dalam pemerintahan desa dinilai mampu mempercepat proses administrasi dan memperbaiki sistem pengarsipan data (Najich Alfayn, 2022).

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa SID membantu dalam proses pengelolaan administrasi dan dokumentasi desa. Sistem digital mempermudah proses rekapitulasi laporan dan meminimalkan kesalahan pencatatan manual. Penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola desa terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi (Musthofa et al., 2024). Operator SID menyampaikan bahwa sistem ini mempercepat pelayanan administrasi, khususnya dalam pembuatan surat keterangan dan

pengolahan data kependudukan. Namun demikian, keterbatasan jaringan internet dan kurangnya pelatihan teknis menjadi hambatan dalam optimalisasi sistem. Keberhasilan e-government sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia (Febria Nurita, 2016).

Perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa pelayanan administrasi menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih lebih memilih pelayanan tatap muka karena belum terbiasa dengan sistem digital. Rendahnya literasi digital masyarakat merupakan salah satu tantangan dalam implementasi pelayanan publik berbasis teknologi (Marfu'ah et al., 2024).

#### **4.2 Pembahasan**

Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi e-government dalam mewujudkan good governance di Desa Plesungan berdasarkan lima indikator utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Kelima indikator tersebut merupakan prinsip good governance menurut UNDP yang relevan untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan desa dalam konteks digitalisasi pelayanan publik.

##### **1. Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam good governance yang menekankan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks implementasi e-government, transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi pelayanan publik secara digital, termasuk prosedur administrasi, persyaratan dokumen, dan informasi kegiatan desa. Berdasarkan hasil penelitian, Desa Plesungan telah memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai media penyampaian informasi administrasi dan kegiatan pemerintahan. Keberadaan sistem digital ini mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tanpa harus selalu datang ke kantor desa. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan

keterbukaan informasi dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yaya dan Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa digitalisasi desa mampu meningkatkan transparansi pemerintahan apabila informasi dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, Wijaya (2021) menegaskan bahwa e-government berperan dalam meminimalkan praktik birokrasi tertutup karena setiap proses terdokumentasi secara sistematis dalam sistem digital. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa pembaruan informasi dalam sistem belum dilakukan secara rutin. Beberapa informasi belum diperbarui secara berkala sehingga potensi transparansi belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini sesuai dengan temuan Suprastiyo (2019) yang menyatakan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat daerah masih menghadapi kendala budaya birokrasi dan keterbatasan sumber daya manusia.

Dengan demikian, meskipun SID telah meningkatkan transparansi di Desa Plesungan, diperlukan komitmen berkelanjutan dalam memperbarui dan mengelola informasi secara konsisten agar prinsip transparansi benar-benar terwujud.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa atas setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam implementasi e-government, akuntabilitas dapat dilihat dari adanya sistem dokumentasi digital yang memungkinkan proses pelayanan ditelusuri kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SID di Desa Plesungan memungkinkan setiap pelayanan administrasi tercatat secara sistematis. Dokumentasi digital ini memudahkan aparat desa dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelayanan. Selain itu,

sistem digital juga mengurangi potensi kesalahan pencatatan manual.

Temuan ini mendukung penelitian Wijaya (2021) yang menyatakan bahwa penerapan e-government mampu meningkatkan akuntabilitas publik melalui integrasi sistem informasi yang transparan dan terdokumentasi. Demikian pula, Najich Alfayn (2022) menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintahan desa merupakan langkah strategis dalam memperkuat pertanggungjawaban aparatur kepada masyarakat.

Namun demikian, Desa Plesungan belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital yang terintegrasi secara menyeluruh. Evaluasi kinerja masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya terhubung dengan sistem SID. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas masih memerlukan penguatan pada aspek integrasi dan pengawasan internal. Hal ini sejalan dengan pendapat Musthofa et al. (2024) yang menekankan pentingnya sistem evaluasi berbasis teknologi untuk memastikan keberlanjutan tata kelola digital. Oleh karena itu, implementasi e-government telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas, namun masih memerlukan strategi penguatan sistem pengawasan berbasis digital agar akuntabilitas dapat berjalan secara optimal (Najich Alfayn, 2022).

### 3. Efektivitas

Efektivitas mengacu pada kemampuan pemerintah desa dalam mencapai tujuan pelayanan publik secara optimal. Dalam konteks e-government, efektivitas dapat diukur dari kecepatan pelayanan, ketepatan data, dan peningkatan kualitas layanan administrasi. Berdasarkan hasil wawancara, penerapan SID telah mempercepat proses pembuatan surat keterangan dan pengolahan data kependudukan. Aparatur desa tidak lagi melakukan pencatatan berulang karena data telah tersimpan dalam sistem. Hal ini

menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelayanan dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwibin Kannapadang et al. (2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi pemerintahan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik apabila didukung oleh komitmen aparatur dan konsistensi implementasi. Selain itu, Febria Nurita (2016) juga menjelaskan bahwa e-government berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan melalui percepatan proses administrasi. Namun demikian, efektivitas belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan digital dan lebih memilih pelayanan tatap muka. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya dipengaruhi oleh sistem teknologi, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Temuan ini mendukung penelitian Marfu'ah et al. (2024) yang menyatakan bahwa literasi digital masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi pelayanan publik berbasis teknologi.

Dengan demikian, efektivitas implementasi e-government di Desa Plesungan telah mengalami peningkatan, tetapi masih memerlukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar manfaat sistem dapat dirasakan secara menyeluruh (Marfu'ah et al., 2024).

#### 4. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal dalam proses pelayanan publik. Penerapan SID di Desa Plesungan telah mengurangi penggunaan dokumen manual dan mempercepat pengarsipan administrasi. Digitalisasi memungkinkan penghematan waktu dan tenaga kerja dalam proses pelayanan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Febria Nurita (2016) yang menyatakan bahwa e-government meningkatkan efisiensi birokrasi

melalui penyederhanaan prosedur administrasi. Musthofa et al. (2024) juga menegaskan bahwa optimalisasi Sistem Informasi Desa dapat meningkatkan efisiensi kerja aparatur apabila didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan operator SID, gangguan jaringan internet dan keterbatasan perangkat teknologi masih menjadi kendala dalam menjaga stabilitas sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital. Tanpa dukungan jaringan yang stabil, pelayanan berbasis sistem dapat terhambat. Oleh karena itu, meskipun e-government telah meningkatkan efisiensi pelayanan di Desa Plesungan, penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas teknis aparatur menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan sistem (Musthofa et al., 2024).

#### 5. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam implementasi e-government, responsivitas dapat dilihat dari kecepatan aparatur desa dalam memproses permohonan layanan dan memberikan tanggapan atas pertanyaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SID membantu mempercepat proses pelayanan administrasi, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama. Aparatur desa juga dapat langsung mengakses data yang dibutuhkan tanpa mencari arsip manual.

Temuan ini mendukung penelitian Najich Alfayn (2022) yang menyatakan bahwa e-government meningkatkan responsivitas pemerintah melalui percepatan alur komunikasi dan pelayanan. Selain itu, Dwibin Kannapadang et al. (2025) menjelaskan bahwa sistem digital memungkinkan pemerintah memberikan layanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, responsivitas masih perlu ditingkatkan melalui penyediaan fitur pengaduan online dan mekanisme umpan balik digital yang terintegrasi dalam sistem SID. Tanpa adanya saluran komunikasi dua arah yang optimal, potensi e-government dalam meningkatkan responsivitas belum sepenuhnya tercapai (Marfu'ah et al., 2024). Dengan demikian, implementasi e-government di Desa Plesungan telah berkontribusi terhadap peningkatan responsivitas pelayanan, tetapi masih memerlukan pengembangan fitur interaktif agar pelayanan menjadi lebih partisipatif dan responsif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi optimalisasi e-government dalam mewujudkan good governance di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Transparansi**

Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Plesungan telah meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Informasi pelayanan administrasi dan kegiatan desa mulai disampaikan melalui sistem digital sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi dengan lebih mudah. Namun, pembaruan informasi belum dilakukan secara rutin sehingga transparansi belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, transparansi telah mengalami peningkatan, tetapi masih memerlukan komitmen pengelolaan informasi yang lebih konsisten.

2. **Akuntabilitas**

Penggunaan SID memungkinkan setiap proses pelayanan terdokumentasi secara sistematis dan dapat ditelusuri kembali. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital belum terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi diperlukan untuk mendukung akuntabilitas yang lebih optimal.

3. **Efektivitas**

Implementasi e-government melalui SID terbukti meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan administrasi. Proses pembuatan surat dan pengolahan data kependudukan menjadi lebih cepat

dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Meskipun demikian, efektivitas belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme pelayanan digital dan lebih memilih pelayanan tatap muka.

#### 4. Efisiensi

Digitalisasi administrasi desa telah mengurangi penggunaan dokumen manual serta mempercepat proses pelayanan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga kerja. Namun, keterbatasan infrastruktur seperti gangguan jaringan internet dan keterbatasan perangkat teknologi menjadi kendala dalam menjaga stabilitas sistem.

#### 5. Responsivitas

Penerapan SID membantu aparat desa dalam merespons permohonan layanan secara lebih cepat. Akses data yang tersimpan dalam sistem mempercepat proses pelayanan. Akan tetapi, fitur interaktif seperti pengaduan online dan mekanisme umpan balik digital belum sepenuhnya tersedia, sehingga responsivitas belum optimal dalam konteks komunikasi dua arah.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi optimalisasi e-government dalam mewujudkan good governance di Desa Plesungan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa perlu mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi aparat desa dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa guna meningkatkan kompetensi teknis dan profesionalisme pelayanan.
2. Pemerintah desa perlu mengembangkan fitur layanan interaktif, seperti pengaduan online dan sistem umpan balik masyarakat, untuk meningkatkan responsivitas pelayanan publik.
3. Diperlukan penguatan infrastruktur digital, khususnya stabilitas jaringan internet dan ketersediaan perangkat teknologi, agar implementasi e-government berjalan lebih efektif dan efisien.

4. Masyarakat diharapkan meningkatkan partisipasi dan literasi digital agar pemanfaatan layanan berbasis sistem dapat berjalan secara optimal.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji tingkat kepuasan masyarakat terhadap implementasi e-government secara kuantitatif atau melakukan studi komparatif antardesa. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan layanan digital desa agar partisipasi masyarakat dalam penggunaan sistem meningkat.

Dengan adanya strategi optimalisasi yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan implementasi e-government di Desa Plesungan dapat semakin mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwibin Kannapadang, Munawaroh, S., & Purwanto, S. A. (2025). Optimizing E-Government for Enhanced Transparency and Accountability in Local Governance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(5), 4203–4212.  
<https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3962>
- Febria Nurita, R. (2016). PENERAPAN LAYANAN E-GOVERNMENT DALAM PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KOTA MALANG. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(Desember), 238–246.
- kebijakan,+Section+editor,+6.+Taqwaty+F+(58-63)*. (n.d.).
- Marfu'ah, S., Kumalasari, A., & Swasanti, I. (2024). DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK KETIDAKSIAPAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI BOJONEGORO. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2).
- Musthofa, A., Lukito, C., Suhindarno, H., Studi, P., & Publik, A. (n.d.). Optimalisasi Penggunaan Website Sistem Informasi Desa di Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(1), 211–221.
- Najich Alfayn, M. A. (2022). From E-Government to Good Governance: Examining the Impact of Digitalization on Public Service Delivery in Indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 4(2), 19–40. <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i2.14873>
- Nurkartika, N. (2025). E-Government Transformasi Menuju Good Governance. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (Isora)* (Vol. 3). <https://isora.safar.id/index.php/isora>
- Paselle, E., Indarto, K., & Rande, S. (n.d.). *Digital Governance in Public Administration: Enhancing Transparency Through E-Government Platforms*.  
<https://thejoas.com/index.php/>
- Publik di Kantor Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro Vico Tri Okta Pria, P., Novianto, H., Miftahul Huda, M., & Studi Administrasi Publik, P. (n.d.). Dukungan E-Government dalam *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(1), 222–233.
- Suprastiyo, A. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP DI KABUPATEN BOJONEGORO. In *JIAN* (Vol. 3, Issue 1).
- Wijaya, J. H. (2021). GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 3(2).  
<https://doi.org/10.21580/jpw.v3i2.12127>

Yaya, R., & Author, C. (2025). Pengaruh Implementasi E-Government dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dengan Good Government Governance sebagai Variabel Pemoderasi. *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 10(1), 69–81. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>

← <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/authorDashboard/submission/8017> English View Site heny2026

JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Tasks 0 Submission Library View Metadata

**STRATEGI OPTIMALISASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA PLESUNGAN BOJONEGORO**  
Heny Suhindarno, Mochtar Setijohadi, Lita Tri Cahyaningrum

Submission Review Copyediting Production

**Submission Files** Search

19645-2	heny2026, ##default.groups.name.author##, ARTIKEL E-GOVERNMENT.docx (2)	File Utama Naskah
---------	---	-------------------

Download All Files

**Pre-Review Discussions** Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

11:38 14/02/2026